



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR**

JL. BRIGJEN M. ISYA, SH. KOMPLEKS PERKANTORAN PURWAHARJA
TLP. (0265) 745 272 BANJAR 46332
EMAIL : PERINDAG.BANJAR@YAHOO.CO.ID

KATA PENGANTAR

Perencanaan adalah suatu proses sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. telah dipahami secara umum bahwa 'gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan'.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Rencana kerja merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai perencanaan kinerja dalam upaya mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Dan RPJMD Kota Banjar di tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2024.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Banjar, Juli 2024

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KOTA BANJAR



Hji. SRI SOBARIAH, S.E., M.E., M.M.
NIP. 19740423 199902 2 001

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	I
	DAFTAR ISI	ii
BAB	I PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Landasan Hukum	I - 4
	1.3 Maksud dan Tujuan	I - 6
	1.4 Sistematika Penulisan	I - 6
BAB	II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II - 1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	II - 1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 11
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	II - 16
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 19
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 21
BAB	III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III - 1
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III - 2
	3.3 Program dan Kegiatan	III - 4
BAB	IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV - 1
BAB	V PENUTUP	V - 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

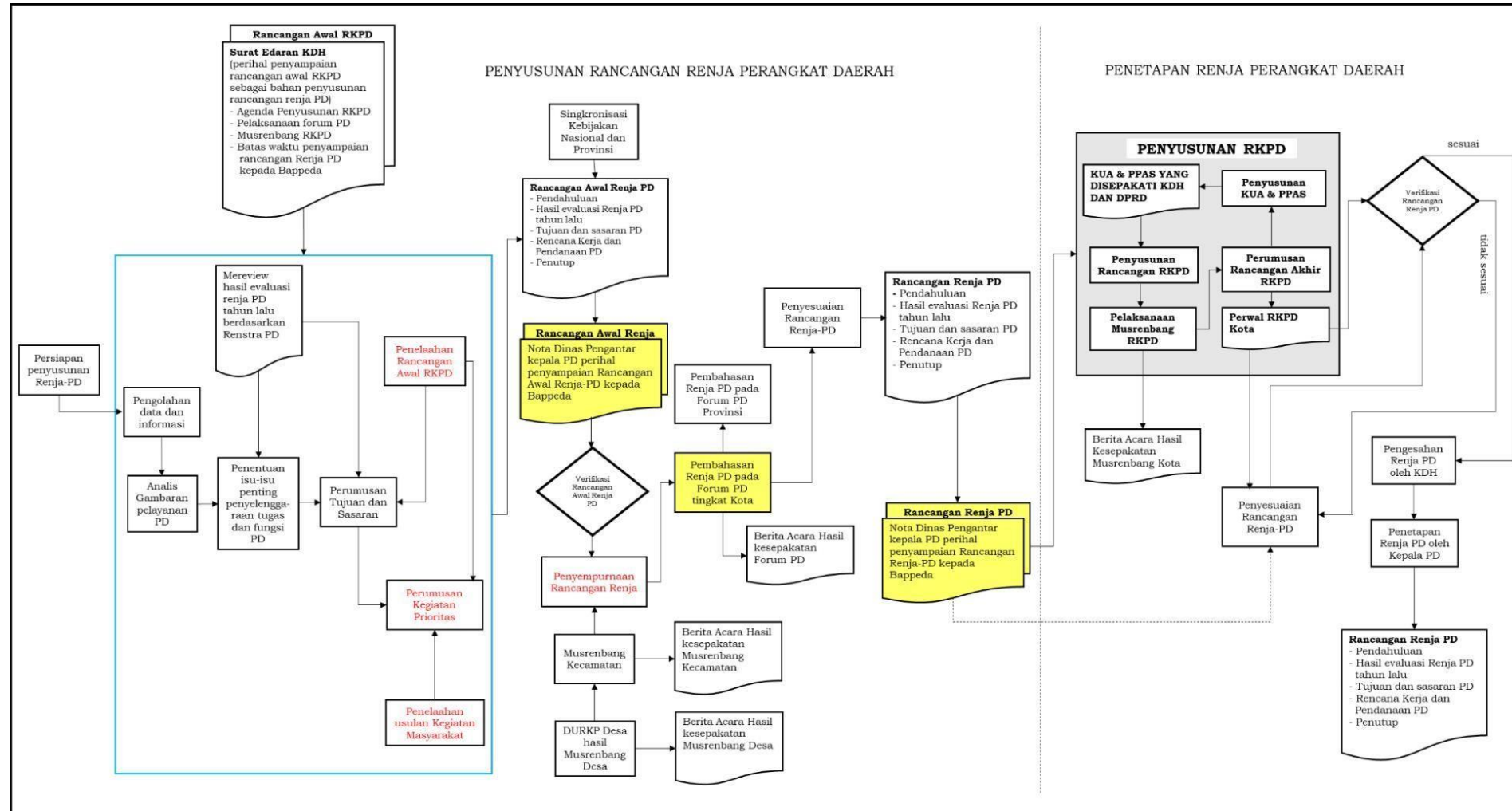
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD. Dibawah ini bagan alir proses penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah :

Gambar 1.

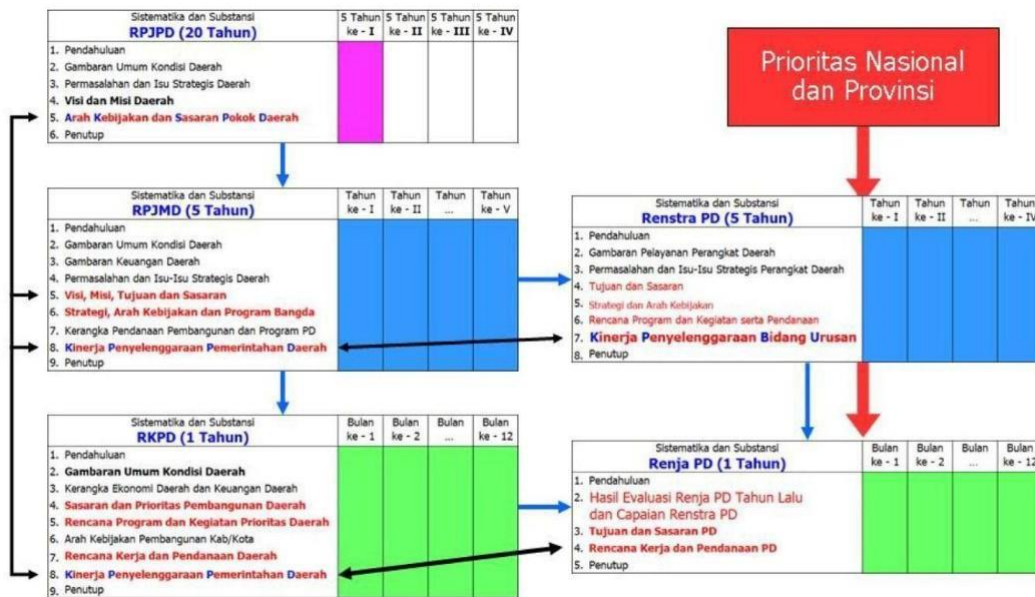
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut :

Gambar 2.

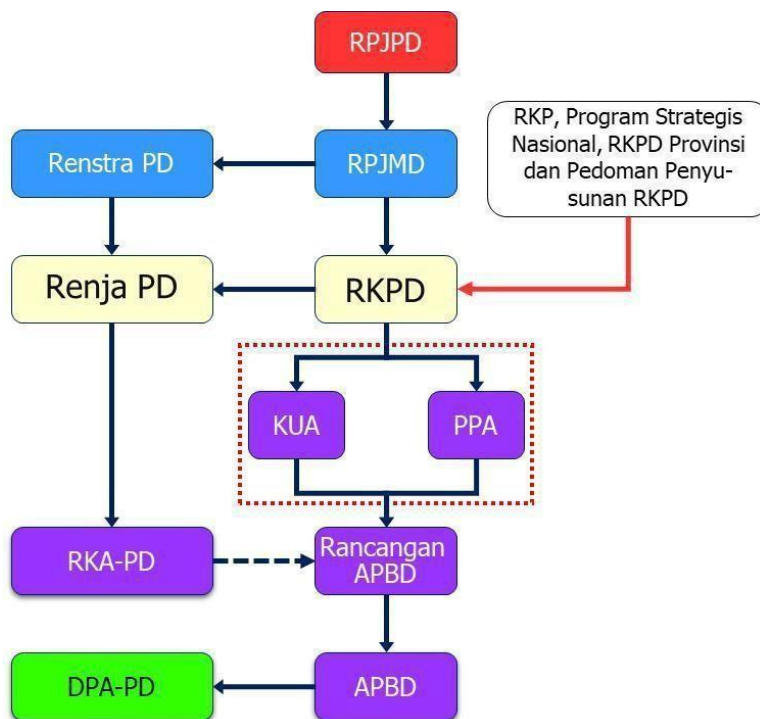
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :

Gambar 3.

Tindaklanjut Renja dengan proses penyusunan RAPBD



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan antara lain :

1. UU RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. UU RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) ;
3. UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
8. UU RI No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
9. UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjar, (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemeintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Banjar di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2024 dan RPD Kota Banjar di tahun 2024;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Perindustrian dan laporan kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rancangan Renja OPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan terhadap IKK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium DevelopmnetGoals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program

dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu) dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri baru 75,76%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
 - a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi capaian 100%
 - b. Program Pengembangan UMKM capaian 96,67 %
 - c. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen capaian 77,60%
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Tidak ada Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :
 - 1) Keterbatasan anggaran karena Pada tahun ini terjadi pandemi COVID – 19 sehingga terjadi refofussing anggaran, yang dapat menurunkan target kinerja yang akan dicapai.
 - 2) Adanya keterbatasan kinerja karena harus melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh gugus tugas covid-19
 - 3) Masih kurangnya sumberdaya manusia aparatur

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
adalah sebagai berikut :
- a. Terhadap Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :
 - 1) Menjadi tidak optimalnya pelayanan capaian kinerja Dinas
 - 2) Tidak terserapnya anggaran
 - b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan, sebagai berikut :
 - 1) Tercapainya kinerja dinas dengan demikian pelayanan terhadap masyarakat
menjadi optimal.
 - 2) Tersampainya hak masyarakat dalam peningkatan kapasitas.
 - 3) Tercapainya tujuan usaha peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sesuai
dengan misi pemerintah Kota Banjar
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- a. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan antara lain :
 - 1) Optimalisasi perencanaan alokasi anggaran dan sumber daya manusia.
 - 2) Peningkatan sinergitas dengan instansi lain.
 - b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan antara lain :
 - 1) Mempertahankan capaian kinerja.
 - 2) Optimalisasi sinergitas dan koordinasi dengan instansi lain.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
TW IV Tahun 2023 , sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksana kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas koperasi, usaha mikro, kecil menengah dan perdagangan;
- e. Pembinaan aparatur sipil negara pada dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1. Sumber Daya manusia

Untuk menunjang kelancaran tugas pekerjaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pegawai yang tersedia sebanyak 39 orang tenaga PNS dan dibantu oleh 92 orang tenaga Non PNS, adapun rincian keadaan pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1. Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2022

No	Nama / NIP	Pangkat	Jabatan
1	EDI HERDIANTO, S.Sos., M.Si. 19630901 198603 1 016	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas
2	NENENG WIDYA HASTUTI, S.Sos.,M.Si. 19750124 200312 2 003	Pembina, IV/a	Sekretaris
3	INA ROSNIDAR SUHLYA, SH., M.Si 19700306 200312 2 002	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perindustrian
4	YADI SURYADI PRAJA, S.Sos., M.AP. 19830226 200801 1 003	Penata Tk. I,III/d	Analisis Kebijakan Muda
5	IRMAN HERMANA, S.TP NIP. 197905272009021004	Penata Tk. I,III/d	Kepala Bidang Perdagangan
6	ISMAYATI, SP., MM. 19770817 200604 2 027	Pembina, IV/a	Kasubag Perencanaan & Evaluasi
7	BUDIANA HAMZAH, SE. 19800314 201001 1 005	Penata Tk. I,III/d	Analisis Kebijakan Muda
8	OKTA ROSMALIATINI, S.Farm., MM. 19861001 201001 2 006	Penata Tk. I,III/d	Pengawas Kemetrolgian Muda
9	HENDRA GUNAWAN, SE., M.AP. 19800228 200501 1 009	Penata Tk. I,III/d	Analisis Kebijakan Muda
10	DEWI PARAMITA MAYASHANTI, SE., MM. 19770515 200801 2 020	Penata Tk. I,III/d	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda
11	AGO WIJAYA, SE., MM. 19750917 200801 1 004	Penata Tk. I,III/d	Pengawas Koperasi
12	H. EKA KOMARA, S.Hut, M.Si. 19830224 200604 1 004	Penata Tk. I,III/d	Kepala UPTD Metrologi Legal
13	BAHRIA IBRAHIM , S.IP 19710502 199403 2 004	Penata, III/c	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda
14	SRI HASRINA HUSNI, S.IP 19730329 200312 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Kasubag Umum, Kepegawaian & Keuangan
15	ASTRI AGUSTIN, S.IP., MM. 19850831 200604 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur
16	NURHAYATI, S.IP. MM. 19800505 200312 2 010	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Industri
17	LESTARI HANDAYANI, A.Md 19811231 201001 2 007	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Keuangan
18	H. AGUS RIBHAN MURTADO, A.Md. 19780820 200901 1 006	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Teknologi Informasi
19	TARWI, A. Md 19760606 200801 2 018	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Pasar
20	DEDY HENDRAYANA, SE. 19750115 200801 1 005	Penata Muda, III/a	Analisis Koperasi
21	TRIMO RIYADI 19660126 200601 1 004	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum
22	LINA ELIA 19701013 200312 2 003	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Penerimaan
23	DIAN PERMATASARI 19841109 200312 2 001	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Keuangan
24	BONDAN PRASETYO, ST. 19940525 202012 1 009	Penata Muda, III/a	Analisis Industri
25	NANSY AFRIHANDINI, S.IP 19880428 202203 2 001	Penata Muda, III/a	Penyuluh Koperasi
26	MUGNI HERLAMBANG, ST. 19940623 202203 1 009	Penata Muda, III/a	Analisis Industri
27	NATHASYA CORNELYA KHAIRUNISSA, S.Si 19981113 202203 2 004	Penata Muda, III/a	Ahli Pertama Penera
28	SOLIHIN 19730105 200701 1 008	Pengatur Tingkat I, II/d	Bendahara
29	RUKIM ROHMANA 19741028 200701 1 004	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Anggaran
30	DIAN HERDIANA 19780126 200801 1 003	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Umum

31	ANDRIS ASMARA 19811108 200801 1 009	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Umum
32	LIANINGSIH 19840424 200801 2 006	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengelola Barang Milik Negara
33	TRISNAYADI 19671012 200604 2 024	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Indentifikasi & Evaluasi Sentra Pengolahan Produk
34	CECEP WARTONO 19781119 200701 1 005	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Umum
35	EKO PRIHANGGORO 19820322 200801 1 004	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha
36	WANDA KURNIA FIDIYANTO, A.md. M. 19980311 202203 1 010	Pengatur, II/c	Terampil Penera
37	ELI NURELI 19660614 200604 1 007	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum
38	AAM 19751228 200701 1 007	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum
39	YOYO HIDAYAT 19680511 200701 1 015	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum

Sumber Data : Subbag Umum Dan Kepegawaian (Juni 2023)

**Tabel 1.2
Pegawai Non PNS Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar
Tahun 2022**

No	Nama	Jabatan
1	Jamal Akrom, S.IP	Petugas Administrasi Pengelola Barang Habis Pakai
2	Ida Diani, SE	Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
3	Eva Nurhayati, SE	Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
4	Lilis Muhlisoh Nurjanah, S.IP	Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
5	Ita Kurniasih, S.IP	Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
6	Silvia Dwi Paluvi, S.IP	Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
7	Endang Kardiana, SE	Perencanaan dan Evaluasi
8	Ihat Solihati, S.IP	Pengadministrasi Umum
9	Baiman Hadi Sucipto, SE	Pengadministrasi Umum
10	Dadang Supriatna	Pengadministrasi Umum
11	Ela Nurlatifah, S.IP	Pengadministrasi Umum
12	Aas Nasrulloh Bahruddin, ST	Pengadministrasi Umum
13	Luthfi Marwan Rosdiana, ST	Pengadministrasi Umum
14	Asep Ridwan Taupik, ST	Pengadministrasi Umum
15	Rima Andini	Pengadministrasi Umum
16	Lisna Fitriani, SE	Pengadministrasi Persuratan
17	Yunita Cahya Sumirat, S.Ak	Tenaga Pendukung Administrasi Kepegawaian
18	Bayu Komara	Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas
19	Haris Pitoyo	Tenaga Pendukung Pelayanan
20	Kohar	Tenaga Pendukung Pelayanan
21	Solihin	Tenaga Pendukung Pelayanan
22	Junjun Ahmad	Tenaga Pendukung Pelayanan
23	Pendi	Tenaga Pendukung Pelayanan
24	Ajang Dindin, S.HUT	Tenaga Pendukung Pelayanan
25	Asep Sidiq Al Ghofiqi, S.IP	Tenaga Pendukung Pelayanan
26	Erni Herliani	Tenaga Pendukung Pelayanan
27	Fahmi Daniarsyah, SE	Tenaga Pendukung Pelayanan
28	Munawar	Tenaga Pendukung Pelayanan
29	Dian Rusdiana	Tenaga Pendukung Pelayanan
30	Ade Yosep Bastian	Tenaga Pendukung Pelayanan
31	Nurul Fadilah Islami, S.IP	Tenaga Pendukung Pelayanan
32	Rona Setiawan	Tenaga Pendukung Pelayanan
33	Febri Safari Rahayu	Tenaga Pendukung Pelayanan
34	Senja Aradea Isnén	Tenaga Pendukung Pelayanan
35	Wiwin Sri Mulyati, S.IP	Tenaga Pendukung Pelayanan

36	Agus Fajar, S.IP	Petugas Data Entry
37	Tirani Noor Arini, S.KOM	Petugas Data Entry
38	Adhityo Hendrawan, SH	Petugas Data Entry
39	Toyo	Jasa Tenaga Kebersihan
40	Dede Jayusman	Jasa Tenaga Kebersihan
41	Tuti Suningsih	Jasa Tenaga Kebersihan
42	Nino Turisno Arsan	Jasa Tenaga Kebersihan
43	Dudy Riyadi	Jasa Tenaga Kebersihan
44	Gunawan Wastopa	Jasa Tenaga Kebersihan
45	Dimas Ardian	Jasa Tenaga Kebersihan
46	Bambang Bungsu	Jasa Tenaga Kebersihan
47	Rusli	Jasa Tenaga Kebersihan
48	Rusmana	Jasa Tenaga Kebersihan
49	San Miarso	Jasa Tenaga Kebersihan
50	Ruslan	Jasa Tenaga Kebersihan
51	Sadia	Jasa Tenaga Kebersihan
52	Sumarko	Jasa Tenaga Kebersihan
53	Nuryadi	Jasa Tenaga Kebersihan
54	Iwan Sunarlan	Jasa Tenaga Kebersihan
55	Didin Rosidin	Jasa Tenaga Kebersihan
56	Warsono	Jasa Tenaga Kebersihan
57	Engkus Kustiawan	Jasa Tenaga Kebersihan
58	Dadang Kurdian	Jasa Tenaga Kebersihan
59	Warisman	Jasa Tenaga Kebersihan
60	Muhammad Rizky Fidzkrillah	Jasa Tenaga Kebersihan
61	Riyan Saepul Rachman	Jasa Tenaga Kebersihan
62	Ranran Suryana	Jasa Tenaga Kebersihan
63	Regi Rian Rinaldi	Jasa Tenaga Kebersihan
64	Dira Kurniawan	Jasa Tenaga Kebersihan
65	Taufik Nurdiansyah	Jasa Tenaga Kebersihan
66	Tarsono	Jasa Tenaga Kebersihan
67	Yayat Ruhayat	Jasa Tenaga Kebersihan
68	Ikin Kurdiana	Jasa Tenaga Kebersihan
69	Heri Heryadi	Jasa Tenaga Kebersihan
70	Ikbal Nurpadilah	Jasa Tenaga Kebersihan
71	Yogi Irwan	Jasa Tenaga Keamanan
72	Ade Andris Sumirat	Jasa Tenaga Keamanan
73	Roni Hidayat	Jasa Tenaga Keamanan
74	Aceng Gunawan	Jasa Tenaga Keamanan
75	Rusdiana	Jasa Tenaga Keamanan
76	Jejen Jenal Mutakin	Jasa Tenaga Keamanan
77	Saep Maulana	Jasa Tenaga Keamanan
78	Tedi Muhtadin	Jasa Tenaga Keamanan
79	Asep Hermawan	Jasa Tenaga Keamanan
80	Andi Kurniawan	Jasa Tenaga Keamanan
81	Mediyanto	Jasa Tenaga Keamanan
82	Sulaeman	Jasa Tenaga Keamanan
83	Ngadio	Jasa Tenaga Keamanan
84	Liwon	Jasa Tenaga Keamanan
85	Ngadiman	Jasa Tenaga Keamanan
86	Basiran	Jasa Tenaga Keamanan
87	Rizky Pratama, S.IP	Jasa Tenaga Keamanan
88	Dedi	Jasa Tenaga Keamanan
89	Irvan Sachril	Jasa Tenaga Keamanan
90	Heru Santoso	Jasa Tenaga Keamanan
91	Dimas Anwar	Jasa Tenaga Keamanan
92	Deni Rodeni	Jasa Tenaga Supir

Sumber Data : Subag Umum Dan Kepegawaian (Juni 2023)

Kondisi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar pada Tahun 2022 berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

TABEL 1.3
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

GOL./RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERINDUSTRIAN		BIDANG PERDAGANGAN		BIDANG KOPERASI DAN UKM		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4
II/d	2	1	1	-	3	-	1	-	7	1	8
III/a	-	2	2	-	1	1	1	1	4	4	8
III/b	-	3	-	1	1	1	-	-	1	5	6
III/c	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
III/d	-	-	1	1	3	1	2	-	6	2	8
IV/a	-	2	-	0	-	-	1	-	1	3	4
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pegawai Tidak Tetap	8	5	2	1	66	6	1	3	77	15	92
JML	11	13	6	3	78	10	6	4	101	30	132
TOTAL	24		10		88		10		131		

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2023)

Kondisi Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar pada Tahun 2022 berdasarkan pendidikan dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

TABEL 1.4
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN	SEKRETARIAT		BIDANG PERINDUSTRIAN		BIDANG PERDAGANGAN		BIDANG KOPERASI DAN UKM		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI		1			15				15	1	16
SLTP/MTS	1				11				12	-	12
SLTA/MA	5	3	1		42	2	1		49	5	54
D1									-	-	-
D2									-	-	-
D3		1			2	1			2	2	4
S1	4	5	4	1	6	6	2	4	16	16	32
S2	1	3	1	3	2	1	3		7	7	14
JUMLAH	11	13	6	4	78	10	6	4	99	31	132
TOTAL	24		10		88		10		132		

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Juni, 2023)

Kemampuan SDM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar, terutama yang berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar sebagai lembaga yang menangani masalah Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

1.3.2. Sarana Dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar didukung sarana dan prasarana sebagaimana **Tabel 2.1** berikut:

**TABEL 2.1
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR
TAHUN 2022**

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
1	BUS (Penumpang 30 Orang Ke atas)	1	Unit
2	MINI BUS (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	6	Unit
3	TRUCK + ATTACHMENT	1	Unit
4	MOBIL UNIT PAMERAN	1	Unit
5	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA LAIN-LAIN	2	Unit
6	SEPEDA MOTOR	22	Unit
7	GEROBAK TARIK	1	Unit
8	GEROBAK DORONG	6	Unit
9	SEPEDA	2	Unit
10	PERKAKAS BENGKEL KONTRUKSI LOGAM LAIN-LAIN	1	Unit
11	TOOL KIT SET	1	Unit
12	TANG	4	Unit
13	LANDASAN CAP LENGKAP	2	Unit
14	BEJANA UKUR	6	Unit
15	ALAT TIMBANGAN LAIN – LAIN	9	unit
16	ANAK TIMBANGAN BIDUR	80	unit
17	MESIN KETIK MANUAL PORTABLE	1	unit
18	MESIN KETIK ELEKTRONIK	1	unit
19	FILING BESI/METAL	10	unit
20	LEMARI KAYU	1	buah
21	ALAT PENGHANCUR KERTAS	1	buah
22	PAPAN NAMA INSTANSI	6	buah
23	PAPAN PENGUMUMAN	1	buah
24	PAPAN TULIS	1	buah
25	ALAT DETEKTOR UANG PALSU	4	buah
26	ALAT PEMOTONG KERTAS	2	buah
27	OVERHEAD PROJEKTOR	2	buah
28	LEMARI KAYU	21	buah
29	MEJA KAYU/ROTAN	5	buah
30	KURSI BESI/METAL	4	buah
31	MEJA RAPAT	2	buah
32	MEJA KERJA	91	buah
33	KURSI RAPAT	16	buah
34	KURSI PUTAR	9	buah
35	KURSI TAMU	1	buah
36	BANGKU TUNGGU	2	buah
37	MEJA KOMPUTER	2	buah
38	TENDA	1	paket
39	SOFA	6	set
40	MOUBILER LAINNYA	1	buah
41	LEMARI ARSIP	6	buah
42	KURSI KERJA	1	buah
43	LEMARI ES	1	buah
44	AC UNIT	9	unit
45	ALAT PENDINGIN LAIN – LAIN	1	paket
46	KIPAS ANGIN	10	buah
47	RADIO	1	buah
48	TELEVISI	1	buah

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
49	SOUND SYSTEM	1	Unit
50	STABILISATOR	1	buah
51	TANGGA ALUMUNIUM	1	buah
52	DISPENSER	2	buah
53	MIMBAR/PODIUM	1	buah
54	ALAT RUMAH TANGGA LAIN-LAIN	10	buah
55	GENSET	1	buah
56	TONG SAMPAH	10	buah
57	ALAT PEMADAM PORTABLE	22	buah
58	ALAT PEMBANTU PEMADAM KEBAKARAN	1	buah
59	PC UNIT	6	unit
60	LAP TOP	12	buah
61	DEKSTOP	1	buah
62	HARD DISK	1	buah
63	PRINTER	13	buah
64	SCANNER	1	buah
65	PERALATAN JARINGAN LAIN-LAIN	1	buah
66	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	1	buah
67	KURSI PEJABAT ESELON II	3	buah
68	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	14	buah
69	KURSI KERJA PEJABAT LAIN-LAIN	1	buah
70	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAS	1	buah
71	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT LAIN-LAIN	1	buah
72	MICROPHONE/WIRELESS MIC	1	buah
73	PERALATAN STUDIO VISUAL LAIN-LAIN	12	unit
74	CCTV	1	unit
75	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM LAIN-LAIN	1	unit
76	CAMERA ELEKTRONIK	1	Unit
77	SOUND SYSTEM	1	unit
78	HANDY TALKY	3	buah
79	FACSIMILE	1	buah
80	TIMBANGAN ELEKTRONIK	7	buah
81	FREZZER	1	buah
82	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	13	buah
83	ANAK TIMBANGAN	31	buah
84	GELAS UKUR	2	buah
85	VACUUM SYSTEM	1	buah
86	TRIPOD	2	buah
87	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	2	unit
88	BANGUNAN GEDUNG KANTOR LAIN-LAIN	1	unit
89	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI LAIN-LAIN	2	unit
90	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	4	unit
91	BANGUNAN TEMPAT KERJA LAIN -LAIN	1	unit
92	TUGU/TANDA BATAS LAIN-LAIN	1	unit
93	INSTALASI AIR BERSIH LAIN-LAIN	1	unit
94	INSTALASI AIR KOTOR LAIN-LIAN	1	unit
95	JARINGAN PEMBAWA LAIN-LAIN	1	unit
96	JARINGAN DISTRIBUSI LAIN-LAIN	2	unit
97	JARINGAN TELEPON DI ATAS TANAH KAPASITAS SEDANG	1	unit

Sumber: bendahara barang (Juni 2023)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sudah mencukupi. Namun demikian masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang dan memerlukan tambahan fasilitas antara lain gedung kantor yang sudah tidak representatif serta gedung-gedung pendukung pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang masih belum tersedia seperti Gedung Kantor UPTD Metrologi Legal, rumah kemasan, dll.

2.2.2. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka optimalisasi pelayanan tugas pokok dan fungsi dinas kepada masyarakat serta upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pelayanan dinas, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar akan melaksanakan beberapa program inovasi dinas antara lain :

a) Petruk Pakde (Pelayanan Tera Ulang Keliling Pasar Kelurahan dan Desa)

Petruk Pakde adalah kegiatan pelaksanaan Tera Ulang melalui pemanfaatan mobil metrologi legal yang memberikan pelayanan tera ulang berkeliling ke pasar, kelurahan dan desa secara terjadwal, sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang akan melakukan tera ulang alat UTTP nya.

2.2.3. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan urusannya.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2018 - 2023, indikator sasaran dinas dan indikator kinerja kunci yang diacu dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah meliputi :

1. Indikator Nilai Sakip Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2022 tercapai nilai B.
2. Indikator koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah total Koperasi di Kota Banjar di kali 100%. Koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki aktifitas, selama tahun 2022 jumlah koperasi yang melakukan aktifitas berjumlah 57 koperasi dari total 97 koperasi di Kota Banjar dengan demikian koperasi aktif di kota Banjar $57 \text{ koperasi} / 97 \text{ Koperasi} \times 100\% = 56,52\%$.
 $57 \text{ Koperasi} / 97 \text{ Koperasi} \times 100\% = 58,76\%$
3. Indikator koperasi berkualitas adalah perbandingan jumlah koperasi berkualitas dibandingkan dengan jumlah total koperasi di Kota Banjar di kali 100%. Koperasi berkualitas adalah koperasi yang pada tahun 2022 melaksanakan RAT, mengalami pertumbuhan asset, mengalami peningkatan volume usaha. Koperasi berkualitas di Kota Banjar Tahun 2022 berjumlah 18 koperasi dari total 97 Koperasi. Dengan demikian koperasi berkualitas di Kota Banjar $18 \text{ Koperasi} / 97 \text{ Koperasi} \times 100\% = 18,56\%$.

4. Indikator pertumbuhan jumlah usaha mikro adalah jumlah pertumbuhan usaha mikro di Kota Banjar Tahun 2022

Pada tahun 2022 Target Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro sebesar 15, % dapat terealisasi sebesar 15,4,8% .

5. Indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) Sembilan bahan pokok adalah perbandingan harga rata-rata pada tahun dasar dibandingkan dengan harga sekarang dikali 100. Indek harga konsumen tahun 2022 adalah perbandingan antara rata-rata harga Sembilan bahan pokok pada akhir Desember 2019 (tahun dasar) dibandingkan dengan harga rata-rata Sembilan bahan pokok pada akhir Desember 2021 dikali 100.

Target tahun 2022 Indeks harga Konsumen Sembilan Bahan Pokok sebesar 112 dapat terealisasi sebesar 111,78

6. Indikator Persentase laju pertumbuhan ekspor adalah perbandingan antara pertumbuhan nilai ekspor pada tahun n dibandingkan dengan nilai ekapor pada tahun n-1 dikali 100%.

Target indicator % Laju Pertumbuhan Ekspor tahun 2022 sebesar 0,13%, target ini tidak tercapai malah tercapai penurunan sebesar 5,2%., yaitu dari Nilai ekspor pada tahun 2021 sebesar \$ \$ 38.115.588,75,- pada tahun 2022 menjadi \$ 36.076.795,285- sehingga persentase indicator laju pertumbuhan ekspor adalah = $-\$ (36.076.795,285-38.115.588,75)/ 38.115.588,75*100\%$
= -5,2%.,

7. Indikator Persentase pertumbuhan IKM pengolahan formal, Target Tahun 2022 untuk indicator % Pertumbuhan IKM Pengolahan yang berizin sebesar 14,70%.

Pada 2022 data industry berdasarkan dari data Siinas dengan ketentuan kalasifikasi usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin No 64/2016). Pada tahun 2021 jumlah IKM sebanyak 34 unit dan pada tahun 2022 menjadi 39., terdapat penambahan IKM yang berizin sebanyak 5 IKM sehingga persentase pertumbuhan IKM pengolahan yang berizin adalah $5\text{ IKM}/34\text{ IKM} \times 100\% = 14,70\%$

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

TABEL 2.2.1

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan sudah cukup baik, dengan mayoritas program dan kegiatan dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan, hanya terdapat beberapa indikator yang tidak dapat tercapai.

2. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

- a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera,
- b. Belum lengkapnya peralatan standar untuk pengujian alat UTTP dan gedung kemitrologian pelayanan tera, tera ulang.
- c. Kualitas Sumberdaya manusia pelaku usaha Koperasi dan industri yang masih perlu ditingkatkan;
- d. Produk yang dihasilkan oleh Industri kecil Menengah sebagian besar masih belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas;
- e. Sentra-sentra produksi Industri Kecil menengah belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama;
- f. Permodalan yang di miliki pelaku usaha relatif terbatas;
- g. Sarana perdagangan seperti rest area, showroom, outlet, pasar modern, pasar tradisional ditempat -tempat stragtegis belum tertata dengan optimal;
- h. Motivasi dan sikap mental wirausaha rendah;
- i. Masih terbatasnya pemasaran Produk KUKM;
- j. Kurangnya pengembangan usaha koperasi;
- k. Lambatnya pengelolaan dan ketersediaan data di BPS
- l. Adanya dampak pandemic Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat

3. Dampak Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan

Dampak Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan, antara lain :

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang kuat dalam mendukung Visi dan Misi pemerintah Kota Banjar, khususnya misi 2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan tujuan membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif, sasarannya meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat melalui indikator khususnya PDRB per Kapita dan Tingkat inflasi daerah. Serta Misi 6. Mengembangkan daya tarik dan Potensi Daerah dengan tujuan menjadikan Kota Banjar Sebagai daerah Tujuan Wisata, Sasaran Meningkatnya Potensi daerah Berbasis Agropolitan dengan indikator sasaran khususnya Jumlah Produk Unggulan Daerah.

Dukungan terhadap misi Pembangunan daerah Kota Banjar, dilakukan melalui penetapan tujuan dan sasaran dinas yang sejalan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Banjar. Misi 3. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah didukung melalui sasaran dinas antara lain : Sasaran Dinas 2. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Pertumbuhan UMKM dengan indikator Persentase koperasi aktif, Persentase Koperasi Berkualitas dan Persentase pertumbuhan jumlah usaha mikro. Dan sasaran dinas 3. Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Kota Banjar dengan indikator Indeks Harga Konsumen, Persentase Laju Pertumbuhan Ekspor dan Persentase Cakupan UTP yang di Tera dan Tera Ulang. Misi 6 Mengembangkan daya tarik dan Potensi Daerah didukung melalui sasaran Dinas 4. Meningkatnya Daya Saing IKM dengan indikator Persentase Pertumbuhan IKM Pengolahan yang berizin, Jumlah Produk Unggulan dan Jumlah kampung Produktif.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
Memperhatikan Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dampaknya, disimpulkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, meliputi:

- (1) Pelayanan Bidang Perindustrian :
 - a. Kualitas Sumberdaya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan;
 - b. Kuantitas dan kualitas Bahan baku yang masih belum memadai;

- c. Kuantitas dan kualitas produk yang masih belum memadai sehingga daya saingnya masih belum maksimal;
- d. Masih perlunya analisis dampak lingkungan dari kegiatan perindustrian;
- e. Kemasan/packaging produk IKM yang belum inovatif.

(2) Pelayanan Bidang Perdagangan

- a. Belum maksimalnya pemanfaatan Sumberdaya Alam
- b. Belum optimalnya kemampuan SDM pelaku usaha baik dalam manajemen, organisasi, kewirausahaan, teknologi, keuangan dan pemasaran.
- c. Belum optimalnya pemahaman produsen dan konsumen dalam hal aturan/regulasi dunia usaha.
- d. Lemahnya jaringan pemasaran untuk penjualan produk.
- e. Keterbatasan Jaringan kerjasama dalam berusaha

(3) Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :

- a. Tuntutan Masyarakat terhadap produk UMKM yang berkualitas;
- b. Persaingan yang semakin ketat menghadapi pasar bebas yang menuntut produk Kota Banjar untuk memiliki daya saing yang tinggi;

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, meliputi:

(1) Pelayanan Bidang Perindustrian

- a. Posisi strategis Kota Banjar mempermudah dalam memasarkan produk-produk unggulan lokal;
- b. Terbukanya peluang pasar yang memasuki pasar bebas;
- c. Komitmen pemerintah untuk lebih memberdayakan IKM /KUKM;
- d. Tersedianya potensi usaha.

(2) Pelayanan Bidang Perdagangan

- a. Letak geografis Kota Banjar yang Strategis dan semakin meningkatnya minat masyarakat luar Kota Banjar untuk bertransaksi di Kota Banjar;
- b. Adanya Perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha berupa pembinaan peningkatan SDM melalui diklat, fasilitasi peralatan, fasilitasi promosi dan sarana perdagangan;
- c. Masih terbukanya peluang usaha dan pengembangan Usaha skala kecil dan Menengah;
- d. Kebutuhan bahan baku yang tinggi.

(3) Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :

- a. Adanya program kerja dari pemerintah untuk peningkatan kapasitas /Kompetensi para pelaku usaha UMKM
- b. Adanya fasilitasi sarana/prasarana untuk perluasan pangsa pasar
- c. Pengembangan koperasi berbasis agro sebagai kelembagaan Agribisnis

5. Formulasi isu-isu penting

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan antara lain :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ;
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha, meliputi keahlian di bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran ;
- c. Peningkatan Iklim usaha perdagangan yang kondusif ;
- d. Peningkatan Pembinaan dan Peran serta Koperasi dan UMKM;
- e. Peningkatan daya saing dan Produk Unggulan;
- f. Stabilisasi harga bahan pokok
- g. Perdagangan elektronik (*e-commerce*)
- h. Penguatan UMKM dalam upaya pemuihan ekonomi
- i. Upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Proses yang dilakukan dalam riview terhadap rancangan awal RKPD yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses tersebut dilakukan adalah dalam upaya mensinergikan perencanaan Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD Kota Banjar dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah.

Hasil riview terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4.1 berikut :

Tabel 2.4.1

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan, forum perangkat daerah, Musyawarah perencanaan pembangunan kota serta Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diusulkan atas hasil reses.

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan menindaklanjuti Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP Desa) serta Daftar Usulan Kelurahan.

Dari berbagai usulan kecamatan yang berasal dari desa/kelurahan serta Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas hasil reses, dapat dikelompokkan pada :

1. Usulan Bantuan modal
2. Pelatihan
3. Sarana Pemasaran/Outlet
4. Sarana PKL.

Pada dasarnya semua usulan telah terakomodir dalam Renstra, adapun usulan permintaan modal diarahkan pada Bantuan JPE, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi terhadap para pelaku UMKM untuk Outlet diajukan ke bantuan Provinsi.

Tabel 2.5.

- a. Program dan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan nomenklatur baru Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, adalah sebagai berikut :
- 1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - 2) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI
 - 3) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - 5) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - 6) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - 7) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - 8) PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
 - 9) PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - 10) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
 - 11) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - 12) PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
 - 13) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
- b. Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :
- 1) Tidak ada program yang tidak sesuai
- c. Program dan kegiatan yang dilanjutkan ke Provinsi, adalah sebagai berikut :
- 1) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - 2) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - 3) PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - 4) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - 5) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 Triwulan 2 Kota Banjar

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2021 (n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2023	
					Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan eluaran Kegiatan s/d tahun 2023 capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Keg	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Sub	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja	10 dok	6 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	10 dok	100.00
Sub	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Tahun n+1	5 dok	3 dok.	1 dok	1 dok	100	1 dok	5 dok	100.00
Sub	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja	25 dok	15 dok	5 dok	5 dok	100	5 dok	25 Dok	100.00
Sub	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	5 dok	100.00
Keg	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Sub	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	10 dok	6 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	10 dok	100.00
Sub	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	168 bln	84 bln	14 bln	14 bln	100	14 bln	168 bln	100.00
Sub	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksana Tugas ASN	156 bln	52 bln	13 bln	13 bln	100	13 bln	156 bln	100.00
Keg	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Sub	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dinas dan bangunan gedung pasar yang diasuransikan	15 Pasar 120kendaraan	6 Pasar , 56 kendaraan	2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan gedung pasar	2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan	100	2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan	2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan gedung pasar	60.00
Keg	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Sub	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlayannya kebutuhan peralatan rumah tangga dan spanduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya biaya pencetakan dokumen dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlayannya kebutuhan alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu dan Kegiatan rapat internal kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Sub	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2021 (n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2023	
						Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan eluaran Kegiatan s/d tahun 2023 capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	11	12
Sub	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	156 bln	26 bln	13 bln	13 bln	100	13 bln	13 bln	33.33
Keg	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah										
Sub Keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas dibayar pajak/STNK nya	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100	30 unit	30 unit	100
Sub Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Terpenuhinya Pemeliharaan bangunan gedung kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
Sub Keg	Pemeliharaan Mebel		Tersedianya mebeleur kantor yang layak dan memadai	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100
Sub Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis (CCTV da AC)	2 jenis (CCTV da AC)	2 jenis (CCTV da AC)	2 jenis (CCTV da AC)	100	2 jenis (CCTV da AC)	2 jenis (CCTV da AC)	100
Sub Keg	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis (komputer)	1 jenis (komputer)	1 jenis (komputer)	1 jenis (komputer)	100	1 jenis (komputer)	1 jenis (komputer)	100
Sub Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan kantor	2 jenis (gerobak sampah dan arco)	2 jenis (gerobak sampah dan arco)	2 jenis (gerobak sampah dan arco)	2 jenis (gerobak sampah dan arco)	100	2 jenis (gerobak sampah dan arco)	2 jenis (gerobak sampah dan arco)	100
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			% Cakupan Peningkatan Volume Usaha Koperasi								
Keg	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										
Sub Keg	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang dinilai peningkatan klasifikasi (Kop)	81 koperasi	81 koperasi	81 koperasi	81 koperasi	100	81 koperasi	81 koperasi	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI			Jumlah koperasi yang dibina								
Keg	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Kop)								
Sub Keg	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi(DAK)		Jumlah pengurus koperasi yang ditingkatkan wawasannya (Org)	375 Orang	200 Orang	75	75	100	90	365	97.33
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (DAK)		Jumlah Pengusaha UMKM yang ditingkatkan wawasannya (Org)	505 UMKM	355 UMKM	75	75	100	90	520	102.97
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Cakupan Usaha Mikro yang dibina menjadi Usaha Kecil								
Keg	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil										
Sub Keg	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan		Jumlah event Pameran (even)	7	3 Event	0	1	0%	0	4	57.14
			Jumlah Penerima bantuan modal JPE agi UMKM	8855	4779 Orang	2425	2423	99.92	2165	9361	105.71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2021 (n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2023	
						Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan eluaran Kegiatan s/d tahun 2023 capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	11	12
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
Keg			Cakupan % Pencapaian Target PAD								
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Sarana prasarana Distribusi Perdagangan Yang Dikembangkan								
Sub Keg	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah fasilitas lahan tanah PT KAI yg digunakan oleh pasar Banjar	5 Th	3 Th	0	0	0	2	5	100.00
Keg			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								
Sub Keg	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pengelola yang mendapat fasilitas penyuluhan Pembinaan (org)	60	-	20 Orang	20%	100%	20%	60	100.00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Indeks Harga Konsumen Sembilan Bahan Pokok								
Keg			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								
Sub Keg	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok (kali)	12 Kali	8	0	0	100%	0	8	66.67
Sub Keg	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah pemantauan harga kebutuhan bahan pokok (kali)	480 kali	288 kali	96 kali	96 kali	100%	96 kali	480	100.00
Sub Keg	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah operasi pasar rakyat (kali)	5 Kali	3 kali	1 kali	1 kali	100%	1	5	100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			% laju pertumbuhan ekspor								
Keg			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Sub Keg	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen monev (org)	5 Kali	3 dok	1 dok	1 dok	100%	1	5	100.00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			% Cakupan UTTP yang ditera dan Tera Ulang								
Keg			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								
Sub Keg	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	6000	2,000	2200	2211	100.50	2300	2211	36.85
Sub Keg	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	5 dok	100.00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			100%	100%	100%			0%
Keg			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			1	100%	100%			
Sub Keg	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Persentase terselesainya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100							
Sub Keg	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	0	-	-		1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2021 (n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2023	
						Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan eluaran Kegiatan s/d tahun 2023 capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	11	12
	Sub Keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	2	1	1	100%	-	3	150.00
	Sub Keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3	2	1	1	100%	5	8	266.67
	Sub Keg	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	1	0	-	-	0	0	0	-
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI											
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)									
	Sub Keg	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan PUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Petiziznzn Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan usaha untuk bidang usaha dengan Resiko Usaha Menengah, tinggi, dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dok	-	-	-	0%	1	1	100.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industri dalam lingkup perijinan usaha industri, perijinan perluasan usaha industri, perijinan kawasan industri dan perijinan perluasan kawasan indutri kewenangan kabupaten/kota	2 dok	-	-	-	0%	2	2	100.00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini								
		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil.								
	Sub Keg	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	3 dok	1	2 dok	2 dok	100%	0 dok	3 dok	100.00

Tabel 2.2.. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kota Banjar

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas KUKMP
Kota Banjar

No	Indikator	Target Renstra Perangkat daerah					Realiasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	4	5	6	7	8	9			11	12	
1	Nilai Sakip OPD	CC	CC	B	B	B	B	B	B			
2	Persentase Koperasi Aktif	97.53%	97.53%	98.77%	98.77%	98.77%	97.53%	56.04	56.52	58.76	60.44	
3	Persentase koperasi berkualitas	17.28%	20.99%	24.69%	28.40%	32.10%	17.28%	16.48	17.39	18.56	18.68	
4	Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha mikro	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	10.6%	79.27	20%	16%	40.0%	
5	Indeks Harga Konsumen Sembilan Bahan Pokok	103	106	109	112	115	100.21	102.22	106.99	111.78	115	
6	Pertumbuhan Nilai Ekspor	0.50%	1.00%	1.50%	2.00%	2.50%	4.16%	-3.93	3.13%	-5.2	0.30%	
7	Persentase Pertumbuhan IKM Pengolahan yang Berizin	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	4.26%	4.41	70%	14.70%	80%	
8	Jumlah Produk Unggulan	-	1	1	1	0	-	-	1	0	0	
9	Jumlah Kampung Produktif/Kampung UMKM	2	1	1	1	1	2	-	1	0	0	

TABEL. 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DISKUKMP TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

OPD: DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR

NO	KODE REK	RANCANGAN AWAI RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
		URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
		TOTAL				11,890,057,411	TOTAL				11,890,057,411
		SEKRETARIAT				8,161,066,810	SEKRETARIAT				8,161,066,810
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,161,066,810	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,161,066,810
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16,886,100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16,886,100
1	2.18.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKUKMP	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD	1 dok.	2,644,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKUKMP	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD	1 dok.	2,644,400
2	2.18.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya RKA tahun n+1	1 dok.	2,648,250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya RKA tahun n+1	1 dok.	2,648,250
3	2.18.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	DISKUKMP	Tersedianya RKA Perubahan tahun n	1 dok.	2,499,450	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	DISKUKMP	Tersedianya RKA Perubahan tahun n	1 dok.	2,499,450
4	2.18.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya DPA Murni RKPD	1 dok.	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya DPA Murni RKPD	1 dok.	-
5	2.18.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya DPA Perubahan RKPD	1 dok.	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya DPA Perubahan RKPD	1 dok.	-
6	2.18.01.02.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISKUKMP	Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja kantor (LAKIP, LPPD dan LKPJ)	3 dok.	4,094,000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISKUKMP	Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja kantor (LAKIP, LPPD dan LKPJ)	3 dok.	4,094,000
7	2.18.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKUKMP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	1 dok.	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKUKMP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	1 dok.	5,000,000
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,835,517,448	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,835,517,448
1	2.18.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKUKMP	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	14 bulan	4,832,797,448	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKUKMP	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	14 bulan	4,832,797,448
2	2.18.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	DISKUKMP	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok.	2,720,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	DISKUKMP	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok.	2,720,000
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				885,578,562	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				885,578,562
1	2.18.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISKUKMP	Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaraan dan bangunan gedung pasar	2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan	885,578,562	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISKUKMP	Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaraan dan bangunan gedung pasar	2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan gedung pasar	885,578,562
5		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				-
1	2.18.01.02.05.11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daeah	DISKUKMP	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daeah		-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daeah	DISKUKMP	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi		-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55,000,000
		Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DISKUKMP	Jumlah pakrt pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		55,000,000	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DISKUKMP	Jumlah pakrt pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		55,000,000.00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	DISKUKMP	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan		-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	DISKUKMP	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan		-
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				310,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				310,000,000
1	2.18.01.02.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISKUKMP	Terwujudnya penerangan gedung kantor	12 bln	15,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISKUKMP	Terwujudnya penerangan gedung kantor	12 bln	15,000,000
2	2.18.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKUKMP	Terlayannya kebutuhan alat tulis kantor	64 jenis	40,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKUKMP	Terlayannya kebutuhan alat tulis kantor	64 jenis	40,000,000
3	2.18.01.02.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	DISKUKMP	Terlayannya kebutuhan peralatan rumah tangga dan spanduk	27 jenis	35,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	DISKUKMP	Terlayannya kebutuhan peralatan rumah tangga dan spanduk	27 jenis	35,000,000
4	2.18.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	DISKUKMP	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu dan Kegiatan rapat internal kantor	12 bln	30,000,000	Penyediaan Bahan Logistik kantor	DISKUKMP	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu dan Kegiatan rapat internal kantor	12 bln	30,000,000
5	2.18.01.02.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISKUKMP	Terpenuhinya biaya pencetakan dokumen dan penggandaan	12 bln	35,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISKUKMP	Terpenuhinya biaya pencetakan dokumen dan penggandaan	12 bln	35,000,000
6	2.18.01.02.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISKUKMP	Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinya biaya iklan	12 bln	25,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISKUKMP	Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinya biaya iklan	12 bln	25,000,000
7	2.18.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	DISKUKMP	Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bln	130,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	DISKUKMP	Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bln	130,000,000

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130,000,000
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bln	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bln	-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bln	80,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	12 bln	80,000,000
			Pengadaan Mabler		Jumlah Unit Meblairea yang di sediakan		50,000,000	Pengadaan Mabler		Jumlah Unit Meblairea yang di		50,000,000
			Pengadaan Asset Tak berwujud		Jumlah unit Asset Tak berwujud yang di sediakan		-	Pengadaan Asset Tak berwujud		Jumlah unit Asset Tak berwujud yang di sediakan		-
8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,510,584,700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,510,584,700
1	2.18.01.02.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKUKMP	Lancarnya pembayaran rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik keperluan kantor	12 bln	130,584,700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKUKMP	Lancarnya pembayaran rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik keperluan kantor	12 bln	130,584,700
2	2.18.01.02.08.04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DISKUKMP		92 orang	1,380,000,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DISKUKMP		92 orang	1,380,000,000
9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		417,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		417,500,000
1	2.18.01.02.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKUKMP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 unit	150,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKUKMP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	25 unit	150,000,000
2	2.18.01.02.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKUKMP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	72,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKUKMP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	72,000,000
3	2.18.01.02.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	DISKUKMP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 jenis (komputer)	10,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	DISKUKMP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 jenis (komputer)	10,500,000
			Pemeliharaan Mebel	DISKUKMP	Jumlah Pemeliharaan Mebel		15,000,000	Pemeliharaan Mebel	DISKUKMP	Jumlah Pemeliharaan Mebel		15,000,000
4	2.18.01.02.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	DISKUKMP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	pasar (kebocoran dll)	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	DISKUKMP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	pasar (kebocoran dll)	150,000,000
5	2.18.01.02.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 jenis (CCTV da AC)	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 jenis (CCTV da AC)	10,000,000
6	2.18.01.02.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 jenis (gerobak sampah dan arco)	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 jenis (gerobak sampah dan arco)	10,000,000
2	17		KOPERASI DAN UKM				2,844,732,003	KOPERASI DAN UKM				2,844,732,003
I			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang berkualitas	18.68	30,000,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang berkualitas	18.68	30,000,000
1			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				30,000,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				30,000,000
1	2.17.03.2.01.01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terbinanya koperasi di Kota Banjar	91 koperasi	30,000,000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terbinanya koperasi di Kota Banjar	91 koperasi	30,000,000
II			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	27.47	64,428,003	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang	27.47	64,428,003
1			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				64,428,003	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				64,428,003
1	2.17.04.2.01.01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah KSP USP yang di nilai	25 Kop	64,428,003	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah KSP USP yang di nilai	25 Kop	64,428,003
III			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian yang telah dilaksanakan		400,304,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian yang telah dilaksanakan		400,304,000
1			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah eanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		189,000,000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah eanggotaan dalam daerah		189,000,000
1	2.17.05.2.01.01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	KOTA BANJAR	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	189,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	KOTA BANJAR	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	189,000,000
			a. Pendidikan Perkoperasian dan Manajemen Usaha		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		-	a. Pendidikan Perkoperasian dan Manajemen Usaha		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah		-
			b. Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengelola dan Pengurus Koperasi indikator : jumlah pengurus koperasi yang ditingkatkan wawasannya		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		-	b. Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengelola dan Pengurus Koperasi indikator : jumlah pengurus koperasi yang ditingkatkan wawasannya		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		-
			c. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi Koperasi			120 Orang	-	c. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi Koperasi			120 Orang	-

		2.17.05.2.01.03	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Terfasilitasinya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM di Kota Banjar	75 Orang	211,304,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Terfasilitasinya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM di Kota Banjar	75 Orang	211,304,000
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha		Jumlah pelaku Usaha Mikro yang di tingkatkan kafasitas SDM nya(org)		211,304,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha		Jumlah pelaku Usaha Mikro yang di tingkatkan kafasitas		211,304,000
IV			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				200,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				200,000,000
1			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000
1		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Event pameran dan Penerima Dana Hibah	3 Event pameran dan 1 Kel Penerima Dana Hibah	200,000,000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Event pameran dan Penerima Dana Hibah	3 Event pameran dan 1 Kel Penerima Dana Hibah	200,000,000
					a. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi indikator : Jumlah MoU Kerjasama	2 MOU				a. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi indikator : Jumlah MoU Kerjasama	2 MOU	
V			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				450,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				450,000,000
1			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				450,000,000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				450,000,000
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah penerima program Banjar Produktif yang di verifikasi (Orang)/Jumlah Dokumen Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 dok	-	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah penerima program Banjar Produktif yang di verifikasi (Orang)/Jumlah Dokumen Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha	1 dok	-
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha mikro yg bermitra	2 UMKM	50,000,000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha mikro yg bermitra	2 UMKM	50,000,000
1		2.17.07.2.01.02	Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro yang di terbitkan	KOTA BANJAR	Jumlah Perizinan usaha yang diterbitkan		50,000,000	Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro yang di terbitkan	KOTA BANJAR	Jumlah Perizinan usaha yang diterbitkan		50,000,000
2		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan	125 KUMKM	300,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan	125 KUMKM	300,000,000
3		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Keg	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	1 Keg	50,000,000
VI			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Prosentase Usaha mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	3%	1,700,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Prosentase Usaha mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	3%	1,700,000,000
1			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1,700,000,000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1,700,000,000
1		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha mikro yang di beri stimulan	1600	1,700,000,000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha mikro yang di beri stimulan	1600	1,700,000,000
				KOTA BANJAR	Jumlah pelaku UMK yang mendapat pembinaan produk unggulan (UMK)	20			KOTA BANJAR	Jumlah pelaku UMK yang mendapat pembinaan produk	20	
				KOTA BANJAR	Jumlah event Pameran (even)	2 event	100,000,000		KOTA BANJAR	Jumlah event Pameran (even)	2 event	100,000,000
				KOTA BANJAR	Jumlah Penerima Bantuan modal JPE	1500 org	1,600,000,000		KOTA BANJAR	Jumlah Penerima Bantuan modal JPE	1500 org	1,600,000,000
				KOTA BANJAR	Tersedianya Bangunan Outlet pemasaran Produk UMKM	1 Unit	-		KOTA BANJAR	Tersedianya Bangunan Outlet pemasaran Produk UMKM	1 Unit	-
				KOTA BANJAR	Terfasilitasinya sarana dan prasarana tempat usaha para pedagang kaki lima	1 Paket	-		KOTA BANJAR	Terfasilitasinya sarana dan prasarana tempat usaha para pedagang kaki lima	1 Paket	-
				KOTA BANJAR	Tersedianya sarana Kendaraan Promosi pemasaran Produk UMKM	1 Unit			KOTA BANJAR	Tersedianya sarana Kendaraan Promosi pemasaran Produk UMKM	1 Unit	
			PERDAGANGAN				276,056,828	PERDAGANGAN				276,056,828
I			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				78,834,125	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				78,834,125
1			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				48,500,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				48,500,000
1		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	KOTA BANJAR	Terfasilitasinya lahan tanah PT KAI yg digunakan oleh pasar Banjar		48,500,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	KOTA BANJAR	Terfasilitasinya lahan tanah PT KAI yg digunakan oleh pasar Banjar		48,500,000
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di bangun	3 unit				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di bangun	3 unit	
					Revitalisasi /Pemeliharaan Pasar	3 Unit				Revitalisasi /Pemeliharaan Pasar	3 Unit	
2			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				30,334,125	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				30,334,125
1		3.30.03.2.02.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	KOTA BANJAR	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan		30,334,125	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	KOTA BANJAR	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan		30,334,125

II			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				55,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				55,000,000
1			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-
1		3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	KOTA BANJAR			-	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	KOTA BANJAR			-
2			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				45,000,000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				45,000,000
1		3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Tersedianya data IHK	12 kali	15,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Tersedianya data IHK	12 kali	15,000,000
2		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	KOTA BANJAR	Tersedianya data harga sembako dan barang strategis lainnya	96 Kali	15,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	KOTA BANJAR	Tersedianya data harga sembako dan barang strategis lainnya	96 Kali	15,000,000
3		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terpenuhinya distribusi barang/kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan	2 Kali	15,000,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terpenuhinya distribusi barang/kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan	2 Kali	15,000,000
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di TK daerah Kabupten/Kota				10,000,000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di TK daerah Kabupten/Kota				10,000,000
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Petstisida bersubsidi	KATA BANJAR	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Petstisida bersubsidi	4 Kali	10,000,000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Petstisida bersubsidi	KATA BANJAR	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Petstisida bersubsidi	4 Kali	10,000,000
III			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentas Pertumbuhan nilai Ekspor	%	52,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentas Pertumbuhan nilai Ekspor	%	52,000,000
1			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pertumbuhan nilai Ekspor		52,000,000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pertumbuhan nilai Ekspor		52,000,000
1		3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen monev	Dokumen	7,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen monev	Dokumen	7,000,000
					Jumlah Penerima Hibah	Kel	-			Jumlah Penerima Hibah	Kel	-
			Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional	Event	30,000,000	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional	Event	30,000,000
			Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Lokal	Event	15,000,000	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Lokal	Event	15,000,000
IV			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	96.67	52,222,703	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	96.67	52,222,703
1			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86.67	52,222,703	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86.67	52,222,703
1		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	KOTA BANJAR	Terlayannya tera/tera ulang alat UTTP	2600 UTTP	44,722,703	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	KOTA BANJAR	Terlayannya tera/tera ulang alat UTTP	2600 UTTP	44,722,703
				KOTA BANJAR	Terfasilitasinya verifikasi alat standar ukur ke Kementerian Perdagangan	1 dok			KOTA BANJAR	Terfasilitasinya verifikasi alat standar ukur ke Kementerian Perdagangan	1 dok	
				KOTA BANJAR	Tersedianya Gedung metrologi	1 unit	-		KOTA BANJAR	Tersedianya Gedung metrologi	1 unit	-
2		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	KOTA BANJAR	Terlaksananya pengawasan penggunaan alat UTTP di Kota Banjar	5 Kali	7,500,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	KOTA BANJAR	Terlaksananya pengawasan penggunaan alat UTTP di Kota Banjar	5 Kali	7,500,000
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				38,000,000.00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				38,000,000.00
			Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				38,000,000.00	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				38,000,000.00
			Pelaksanaan Promosi ,Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	SUMKM	23,000,000.00	Pelaksanaan Promosi ,Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk	SUMKM	23,000,000.00
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	KOTA BANJAR	Jumlah data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4 Dok	15,000,000.00	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	KOTA BANJAR	Jumlah data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi	4 Dok	15,000,000.00
							608,201,770.00					608,201,770.00
			PERINDUSTRIAN				608,201,770	PERINDUSTRIAN				608,201,770
I			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	KOTA BANJAR	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		430,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	KOTA BANJAR	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang		300,000,000
1			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		430,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		300,000,000
1		3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Fasilitas Hibah bagi Dekranasda	Dokumen	100,000,000.00	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Fasilitas Hibah	Dokumen	100,000,000.00

			Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Dokumen	80,000,000.00	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Dokumen	100,000,000.00
2	3.31.02.2.01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Kali(40 IKM)	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Kali(40 IKM)	-
				KOTA BANJAR	Terdedinya mobil kemasan	1 unit	-		KOTA BANJAR	Terdedinya mobil kemasan	1 unit	-
3	3.31.02.2.01.05		Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat(Pelatihan Desain Kemasan)	1Kali(25 IKM)	150,000,000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat(Pelatihan Desain Kemasan)	1Kali(25 IKM)	100,000,000
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				160,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				130,000,000
4	3.31.03.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	80,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	80,000,000.00
					Fasilitasi Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) Bagi IKM		50,000,000.00			Fasilitasi Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) Bagi IKM		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	30,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	50,000,000.00
II			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				18,201,770	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				178,201,770
1			Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya informasi Industri	1 dok	18,201,770	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya informasi Industri	1 dok	178,201,770
1	3.31.04.2.01.02		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1 Dokumen	18,201,770	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1 Dokumen	78,201,770
										Fasilitasi Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) Bagi IKM	1 Dokumen	100,000,000
			Jumlah Anggaran OPD				11,890,057,411	Jumlah Anggaran OPD				11,890,057,411
			Terdiri dari :					Terdiri dari :				
			Belanja Gaji Pegawai				4,555,404,505	Belanja Gaji Pegawai				4,555,404,505
			Belanja Kegiatan				7,334,652,906	Belanja Kegiatan				7,334,652,906

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 dengan Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan Misi : (1) Peningkatan Kualitas manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Pengakuan Sistem hokum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan terpercaya dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UMKMdiharaskan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya, yaitu “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk mendukung Presiden mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.”

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024, maka misi kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari pokok visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern;
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausahawan Baru (*New Entrepreneur*)

2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains* (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*).
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan diantaranya :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonis rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang salah satunya melalui pengembangan sector/komoditas/kegiatan unggulan daerah.

Adapun yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan antara lain Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang Berkualitas dan berdaya saing Serta Mengurangi Disparitas Ekonomi dengan sasaran :

1. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian masyarakat melalui indikator laju pertumbuhan sektor industry, laju pertumbuhan sector perdagangan.
2. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi melalui indicator Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar menetapkan tujuan utama pembangunan bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas
2. Meningkatkan Kinerja dan Peran Pembangunan Koperasi Serta UMKM
3. Meningkatkan Peran dan Perdagangan Kota Banjar
4. Meningkatkan Daya Saing Industri Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran ditetapkan pula indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi PD. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahun secara berkesinambungan sejalan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran utama yang akan dicapai Dinas Koperasi UKM adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Pertumbuhan UMKM
3. Meningkatnya Peran Perdagangan dalam Stabilitas Perekonomian Kota Banjar
4. Meningkatnya daya saing IKM

Sasaran keberhasilan Program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Program-program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan masing-masing strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program kegiatan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang direncanakan untuk dilaksanakan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

MISI 3. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Tujuan : Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif

Sasaran : Meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat

Indikator :

1. Pertumbuhan PDRB perkapita
2. Tingkat Inflasi daerah

MISI 6 : Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah

Tujuan 1: Menjadikan Kota Banjar sebagai daerah tujuan wisata

Sasaran 1.2 : Meningkatnya potensi Daerah Berbasis Agropolitan

Indikator : Cakupan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah (dalam satuan Produk Unggulan Daerah)

Selaras dengan RPD 2024 – 2026, indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sesuai tugas pokok dan fungsinya ditetapkan sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP OPD
2. % Koperasi yang Berkualitas
3. % Pertumbuhan Usaha Mikro
4. Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
5. % Pertumbuhan Nilai Ekspor
6. % Kapasitas Produksi IKM di Kota Banjar
7. % Investasi IKM di Kota Banjar

Tercapainya tujuan organisasi ditentukan oleh berbagai faktor, baik dari segi SDM, pendanaan, sarana dan prasarana serta regulasi. Oleh karena itu integrasi yang selaras dari faktor-faktor tersebut sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Koperasi UKM dapat dilihat antara lain melalui 8 indikator di atas. Sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilannya ditentukan oleh hasil capaian kinerja berdasarkan indikator tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam era persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, diperlukan pelayanan birokrasi yang cepat dan berorientasi kepada kebutuhan serta kepuasan klien. Dengan demikian perlu dilakukan pula upaya pembinaan aparatur di jajaran Dinas Koperasi UKM untuk terus meningkatkan kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta sistem pengelolaan sampai dengan pelaporannya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta RPD Kota Banjar.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana ditampilkan pada **Tabel. 3.1**.

Tabel. 3.2.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/Subkegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/Subkegiatan antara lain :

- a. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024 – 2026
- b. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2024 – 2026.
- c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- d. Trend isu yang sedang berkembang terkait pemulihan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan/Sub kegiatan

- a. Jumlah program/kegiatan/Subkegiatan.
 - Program yang direncanakan sebanyak 14 program
 - Kegiatan yang direncanakan sebanyak 15 kegiatan
 - Subkegiatan yang direncanakan sebanyak 24 subkegiatan

- b. Sifat penyebaran lokasi program/kegiatan/Subkegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tersebar ke berbagai kawasan dan tersebar pada seluruh kelompok masyarakat.

- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 11.890.057.411,-.

TABEL. 3.1 RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN DISKUKMP TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

OPD: DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR

NO	KODE REK	RENCANA TAHUN 2024					SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2025	
		URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)			TARGET/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		6	7	
		TOTAL				11,890,057,411			12,059,812,603	
		SEKRETARIAT				8,161,066,810			8,223,900,424	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,161,066,810			8,223,900,424	
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16,886,100			16,886,100	
1	2.18.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKUKMP	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD	1 dok.	2,644,400	APBD	1 dok.	2,644,400	
2	2.18.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya RKA tahun n+1	1 dok.	2,648,250	APBD	1 dok.	2,648,250	
3	2.18.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	DISKUKMP	Tersedianya RKA Perubahan tahun n	1 dok.	2,499,450	APBD	1 dok.	2,499,450	
4	2.18.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya DPA Murni RKPD	1 dok.	-	APBD	1 dok.	-	
5	2.18.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya DPA Perubahan RKPD	1 dok.	-	APBD	1 dok.	-	
6	2.18.01.02.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISKUKMP	Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja kantor (LAKIP, LPPD dan LKPJ)	3 dok.	4,094,000	APBD	3 dok.	4,094,000	
7	2.18.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKUKMP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	1 dok.	5,000,000	APBD	1 dok.	5,000,000	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,835,517,448			4,835,517,448	
1	2.18.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKUKMP	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	14 bulan	4,832,797,448		14 bulan	4,832,797,448	
2	2.18.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	DISKUKMP	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok.	2,720,000	APBD	1 dok.	2,720,000	
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				885,578,562			885,578,562	
1	2.18.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISKUKMP	Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaraan dan bangunan gedung pasar	2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan	885,578,562		2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan gedung pasar	885,578,562	
5		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				-			-	
1	2.18.01.02.05.11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daeah	DISKUKMP	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daeah		-	APBD	Bintek metrologi		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55,000,000				
		Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DISKUKMP	Jumlah pakrt pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		55,000,000.00				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	DISKUKMP	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan		-				
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				310,000,000			320,016,552	
1	2.18.01.02.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISKUKMP	Terwujudnya penerangan gedung kantor	12 bln	15,000,000	APBD	12 bln	15,000,000	

2		2.18.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKUKMP	Terlayannya kebutuhan alat tulis kantor	64 jenis	40,000,000	APBD		64 jenis	40,016,552
3		2.18.01.02.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	DISKUKMP	Terlayannya kebutuhan peralatan rumah tangga dan spanduk	27 jenis	35,000,000	APBD		27 jenis	35,000,000
4		2.18.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	DISKUKMP	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu dan Kegiatan rapat internal kantor	12 bln	30,000,000			12 bln	40,000,000
5		2.18.01.02.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISKUKMP	Terpenuhinya biaya pencetakan dokumen dan penggadaan	12 bln	35,000,000	APBD		12 bln	35,000,000
6		2.18.01.02.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISKUKMP	Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinya biaya iklan	12 bln	25,000,000	APBD		12 bln	25,000,000
7		2.18.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	DISKUKMP	Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bln	130,000,000			12 bln	130,000,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130,000,000				220,000,000
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bln	-	APBN	-	-	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bln	80,000,000	APBN	-	-	170,000,000.00
			Pengadaan Mabler		Jumlah Unit Meblairea yang di sediakan		50,000,000				50,000,000.00
			Pengadaan Asset Tak berwujud		Jumlah unit Asset Tak berwujud yang di sediakan		-				
8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,510,584,700				1,510,584,700
1		2.18.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKUKMP	Lancarnya pembayaran rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik keperluan kantor	12 bln	130,584,700	APBD		12 bln	130,584,700
2		2.18.01.02.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DISKUKMP		92 orang	1,380,000,000	APBD		95 orang	1,380,000,000
9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		417,500,000				435,317,062
1		2.18.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKUKMP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 unit	150,000,000	APBD		25 unit	195,000,000.00
2		2.18.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKUKMP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	72,000,000	APBD		5 unit	72,817,062.00
3		2.18.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	DISKUKMP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 jenis (komputer)	10,500,000	APBD		1 jenis (komputer)	10,500,000.00
			Pemeliharaan Mebel	DISKUKMP	Jumlah Pemeliharaan Mebel		15,000,000				10,000,000.00
4		2.18.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	DISKUKMP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	pasar (kebocoran dll)	150,000,000	APBD		pasar (kebocoran dll)	130,000,000.00
5		2.18.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 jenis (CCTV da AC)	10,000,000	APBD		2 jenis (CCTV da AC)	10,000,000.00
6		2.18.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 jenis (gerobak sampah dan	10,000,000.00	APBD		2 jenis (gerobak sampah dan arco)	7,000,000.00
2	17		KOPERASI DAN UKM				2,844,732,003				2,850,775,314
1			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang berkualitas	18.68	30,000,000				40,000,000
1			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				30,000,000				40,000,000

1		2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terbinanya koperasi di Kota Banjar	91 koperasi	30,000,000	APBD		91 koperasi	40,000,000
II			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI								
1			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	27.47	64,428,003				65,000,000
1							64,428,003				65,000,000
1		2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah KSP USP yang di nilai	25 Kop	64,428,003			30 Kop	65,000,000
III			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
1			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian yang telah dilaksanakan		400,304,000				404,200,000
1					Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah eanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		189,000,000				404,200,000
1		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	KOTA BANJAR	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	189,000,000	APBD		75 Orang	171,100,000
			a. Pendidikan Perkoperasian dan Manajemen Usaha		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		-			60 Orang	-
			b. Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengelola dan Pengurus Koperasi indikator : jumlah pengurus koperasi yang ditingkatkan wawasannya		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		-			30 Orang	
			c. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi Koperasi			120 Orang	-			120 Orang	
		2.17.05.2.01.03	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Terfasilitasinya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM di Kota Banjar	75 Orang	211,304,000				233,100,000
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha		Jumlah pelaku Usaha Mikro yang di tingkatkan kafasitas SDM nya(org)		211,304,000				
IV			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
1			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000				291,575,314
1		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Event pameran dan Penerima Dana Hibah	3 Event pameran dan 1 Kel Penerima Dana Hibah	200,000,000	APBD		3 Event pameran dan 1 Kel Penerima Dana Hibah	291,575,314
					a. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi indikator : Jumlah MoU Kerjasama	2 MOU				2 MOU	-
V			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
1			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				450,000,000				450,000,000
1							450,000,000				450,000,000

			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah penerima program Banjar Produktif yang di verifikasi (Orang)/Jumlah Dokumen Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 dok	-				
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha mikro yg bermitra	2 UMKM	50,000,000				50,000,000
1		2.17.07.2.01.02	Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro yang di terbitkan	KOTA BANJAR	Jumlah Perizinan usaha yang diterbitkan		50,000,000	APBD		2 MoU	50,000,000
2		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan	125 KUMKM	300,000,000	APBD		125 KUMKM	300,000,000
3		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha	1 Keg	50,000,000	APBD		1 Keg	50,000,000
VI			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Prosentase Usaha mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	3%	1,700,000,000				1,600,000,000
1			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1,700,000,000	-	-	-	1,600,000,000
1		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha mikro yang di beri stimulan	1600	1,700,000,000	APBD			1,600,000,000
				KOTA BANJAR	Jumlah pelaku UMK yang mendapat pembinaan produk unggulan (UMK)	20					
				KOTA BANJAR	Jumlah event Pameran (even)	2 event	100,000,000				100,000,000
				KOTA BANJAR	Jumlah Penerima Bantuan modal JPE	1500 org	1,600,000,000				1,600,000,000
				KOTA BANJAR	Tersedianya Bangunan Outlet pemasaran Produk UMKM	1 Unit	-	BANPROV			-
				KOTA BANJAR	Terfasilitasinya sarana dan prasarana tempat usaha para pedagang kaki lima	1 Paket	-	BANPROV			-
				KOTA BANJAR	Tersedianya sarana Kendaraan Promosi pemasaran Produk UMKM	1 Unit					
			PERDAGANGAN				276,056,828				276,643,240
I			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				78,834,125				78,834,125
1			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				48,500,000				48,500,000
1		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	KOTA BANJAR	Terfasilitasinya lahan tanah PT KAI yg digunakan oleh pasar Banjar		48,500,000	APBD	-	-	48,500,000
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di bangun	3 unit			-	-	-
					Revitalisasi /Pemeliharaan Pasar	3 Unit		APBD PROV	-	-	
2			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				30,334,125				30,334,125
1		3.30.03.2.02.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	KOTA BANJAR	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan		30,334,125	APBD			30,334,125
II			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				55,000,000				45,000,000

1			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-				-
1		3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	KOTA BANJAR			-				-
2			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				45,000,000				45,000,000
1		3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Tersedianya data IHK	12 kali	15,000,000	APBD		12 kali	15,000,000
2		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	KOTA BANJAR	Tersedianya data harga sembako dan barang strategis lainnya	96 Kali	15,000,000	APBD		96 Kali	15,000,000
3		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terpenuhinya distribusi barang/kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan	2 Kali	15,000,000	APBD		2 Kali	15,000,000
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di TK daerah Kabupten/Kota				10,000,000				10,000,000
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Petstisida bersubsidi	KATA BANJAR	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Petstisida bersubsidi	4 Kali	10,000,000				10,000,000
III			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentas Pertumbuhan nilai Ekspor	%	52,000,000				32,000,000
1			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pertumbuhan nilai Ekspor		52,000,000				32,000,000
1		3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen movev	Dokumen	7,000,000	APBD		1 dok.	7,000,000
					Jumlah Penerima Hibah	Kel	-	APBD		2 event	25,000,000
			Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional	Event	30,000,000	APBD		2 event	
			Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Lokal	Event	15,000,000				
IV			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	96.67	52,222,703			96.67	50,000,000
1			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86.67	52,222,703			90.00	50,000,000
1		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	KOTA BANJAR	Terlayannya tera/tera ulang alat UTTP	2600 UTTP	44,722,703	APBD		2700 UTTP	42,500,000
				KOTA BANJAR	Terfasilitasinya verifikasi alat standar ukur ke Kementrian Perdagangan	1 dok		APBD		53 jenis alat standar	
				KOTA BANJAR	Tersedianya Gedung metrologi	1 unit	-	APBN		0	-
2		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	KOTA BANJAR	Terlaksananya pengawasan penggunaan alat UTTP di Kota Banjar	5 Kali	7,500,000	APBD		5 Kali	7,500,000
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				38,000,000.00				60,809,115.00
			Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				38,000,000.00				60,809,115.00
			Pelaksanaan Promosi ,Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam	5UMKM	23,000,000.00				45,809,115.00

			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	KOTA BANJAR	Jumlah data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4 Dok	15,000,000.00				15,000,000.00
							608,201,770.00			608,493,625.00	
			PERINDUSTRIAN				608,201,770			- 100,000,000.00	708,493,625
I			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	KOTA BANJAR	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		300,000,000				415,000,000
1			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		300,000,000				415,000,000
1		3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Hibah bagi Dekranasda	Dokumen	100,000,000.00	APBD		Dokumen	45,000,000.00
			Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Dokumen	100,000,000.00	APBD			70,000,000.00
2		3.31.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Kali(40 IKM)	-	APBD		1 Kali(40 IKM)	125,000,000
				KOTA BANJAR	Terdedinya mobil kemasan	1 unit	-	BANPROV		0	
3		3.31.02.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat(Pelatihan Desain Kemasan)	1Kali(25 IKM)	100,000,000	APBD		1Kali(25 IKM)	175,000,000
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				130,000,000				165,000,000
4		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	80,000,000.00	APBD		Dokumen	80,000,000.00
					Fasilitasi Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) Bagi IKM						50,000,000.00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	50,000,000.00				35,000,000.00
II			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				178,201,770				128,493,625
1			Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya informasi Industri	1 dok	178,201,770				128,493,625
1		3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1 Dokumen	78,201,770	APBD		1 Dokumen	28,493,625
					Fasilitasi Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) Bagi IKM	1 Dokumen	100,000,000.00			1 Dokumen	100,000,000.00
			Jumlah Anggaran OPD				11,890,057,411				12,059,812,603
			Terdiri dari :								
			Belanja Gaji Pegawai				4,555,404,505				4,555,404,505
			Belanja Kegiatan				7,334,652,906				7,504,408,098

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, berdasarkan usulan musyawarah perencanaan pembangunan daerah, usulan rencana kerja Perangkat Daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah. Program-program pembangunan daerah tersebut untuk mewujudkan visi dan misi walikota Banjar yang tertuang dalam Rencana Pemambangunan Daerah (RPD) walikota Banjar tahun 2024 – 2026 yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dan Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah serta untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.

Pada Tahun 2024 Dinas KUKMP berencana akan melaksanakan 15 Program terdiri dari Urusan rutin Sekretariat 1 Program, Urusan Perdagangan 5 Program Urusan Koperasi UKM 6 Proram dan Urusan Perindustrian 3 Program dengan total kebutuhan anggaran Rp. 11.890.057.411,-. Rencana Program Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar tahun 2023, dapat di lihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

TABEL 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DISKUKMP TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

OPD: DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR

NO	KODE REK	RENCANA TAHUN 2024					SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU 2025	
		URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)			TARGET/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		6	7	
		TOTAL				11,890,057,411			11,959,812,603	
		SEKRETARIAT				8,161,066,810			8,223,900,424	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,161,066,810			8,223,900,424	
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16,886,100			16,886,100	
1	2.18.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKUKMP	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD	1 dok.	2,644,400	APBD	1 dok.	2,644,400	
2	2.18.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya RKA tahun n+1	1 dok.	2,648,250	APBD	1 dok.	2,648,250	
3	2.18.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	DISKUKMP	Tersedianya RKA Perubahan tahun n	1 dok.	2,499,450	APBD	1 dok.	2,499,450	
4	2.18.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya DPA Murni RKPD	1 dok.	-	APBD	1 dok.	-	
5	2.18.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKUKMP	Tersedianya DPA Perubahan RKPD	1 dok.	-	APBD	1 dok.	-	
6	2.18.01.02.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISKUKMP	Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja kantor (LAKIP, LPPD dan LKPJ)	3 dok.	4,094,000	APBD	3 dok.	4,094,000	
7	2.18.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKUKMP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	1 dok.	5,000,000	APBD	1 dok.	5,000,000	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,835,517,448			4,835,517,448	
1	2.18.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKUKMP	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	14 bulan	4,832,797,448		14 bulan	4,832,797,448	
2	2.18.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	DISKUKMP	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok.	2,720,000	APBD	1 dok.	2,720,000	
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				885,578,562			885,578,562	
1	2.18.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISKUKMP	Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaraan dan bangunan gedung pasar	2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan	885,578,562		2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan gedung pasar	885,578,562	
5		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				-			-	
1	2.18.01.02.05.11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daeah	DISKUKMP	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daeah		-	APBD	Bintek metrologi		
		Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah				55,000,000				
		Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DISKUKMP	Jumlah pakrt pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		55,000,000				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	DISKUKMP	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan		-				
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				310,000,000			320,016,552	
1	2.18.01.02.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISKUKMP	Terwujudnya penerangan gedung kantor	12 bln	15,000,000	APBD	12 bln	15,000,000	

2		2.18.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKUKMP	Terlayannya kebutuhan alat tulis kantor	64 jenis	40,000,000	APBD		64 jenis	40,016,552
3		2.18.01.02.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	DISKUKMP	Terlayannya kebutuhan peralatan rumah tangga dan spanduk	27 jenis	35,000,000	APBD		27 jenis	35,000,000
4		2.18.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	DISKUKMP	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu dan Kegiatan rapat internal kantor	12 bln	30,000,000			12 bln	40,000,000
5		2.18.01.02.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISKUKMP	Terpenuhinya biaya pencetakan dokumen dan penggadaan	12 bln	35,000,000	APBD		12 bln	35,000,000
6		2.18.01.02.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISKUKMP	Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinya biaya iklan	12 bln	25,000,000	APBD		12 bln	25,000,000
7		2.18.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	DISKUKMP	Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bln	130,000,000			12 bln	130,000,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130,000,000				220,000,000
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bln	-	APBN	-	-	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bln	80,000,000	APBN	-	-	170,000,000.00
			Pengadaan Mabler		Jumlah Unit Meblairea yang di sediakan		50,000,000				50,000,000.00
			Pengadaan Asset Tak berwujud		Jumlah unit Asset Tak berwujud yang di sediakan		-				
8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,510,584,700				1,510,584,700
1		2.18.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKUKMP	Lancarnya pembayaran rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik keperluan kantor	12 bln	130,584,700	APBD		12 bln	130,584,700
2		2.18.01.02.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DISKUKMP		92 orang	1,380,000,000	APBD		95 orang	1,380,000,000
9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		417,500,000				435,317,062
1		2.18.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKUKMP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 unit	150,000,000	APBD		25 unit	195,000,000.00
2		2.18.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKUKMP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	72,000,000	APBD		5 unit	72,817,062.00
3		2.18.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	DISKUKMP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 jenis (komputer)	10,500,000	APBD		1 jenis (komputer)	10,500,000.00
			Pemeliharaan Mebel	DISKUKMP	Jumlah Pemeliharaan Mebel		15,000,000				10,000,000.00
4		2.18.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	DISKUKMP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	pasar (kebocoran dll)	150,000,000	APBD		pasar (kebocoran dll)	130,000,000.00
5		2.18.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 jenis (CCTV da AC)	10,000,000	APBD		2 jenis (CCTV da AC)	10,000,000.00
6		2.18.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUKMP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 jenis (gerobak sampah dan arco)	10,000,000.00	APBD		2 jenis (gerobak sampah dan arco)	7,000,000.00
2	17		KOPERASI DAN UKM				2,844,732,003				2,850,775,314
1			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang berkualitas	18.68	30,000,000				40,000,000
1			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				30,000,000				40,000,000

1		2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terbinanya koperasi di Kota Banjar	91 koperasi	30,000,000	APBD		91 koperasi	40,000,000
II			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI								
1			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	27.47	64,428,003				65,000,000
1							64,428,003				65,000,000
1		2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah KSP USP yang di nilai	25 Kop	64,428,003			30 Kop	65,000,000
III			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
1			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian yang telah dilaksanakan		400,304,000				404,200,000
1					Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah eanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		189,000,000				404,200,000
1		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	KOTA BANJAR	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	189,000,000	APBD		75 Orang	171,100,000
			a. Pendidikan Perkoperasian dan Manajemen Usaha		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		-			60 Orang	-
			b. Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengelola dan Pengurus Koperasi indikator : jumlah pengurus koperasi yang ditingkatkan wawasannya		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		-			30 Orang	
			c. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi Koperasi			120 Orang	-			120 Orang	
		2.17.05.2.01.03	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Terfasilitasinya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM di Kota Banjar	75 Orang	211,304,000				233,100,000
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha		Jumlah pelaku Usaha Mikro yang di tingkatkan kafasitas SDM nya(org)		211,304,000				
IV			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
1			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000				291,575,314
1		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Event pameran dan Penerima Dana Hibah	3 Event pameran dan 1 Kel Penerima Dana Hibah	200,000,000	APBD		3 Event pameran dan 1 Kel Penerima Dana Hibah	291,575,314
					a. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi indikator : Jumlah MoU Kerjasama	2 MOU				2 MOU	-
V			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
1			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				450,000,000				450,000,000
1							450,000,000				450,000,000

			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah penerima program Banjar Produktif yang di verifikasi (Orang)/Jumlah Dokumen Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 dok	-				
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha mikro yg bermitra	2 UMKM	50,000,000				50,000,000
1		2.17.07.2.01.02	Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro yang di terbitkan	KOTA BANJAR	Jumlah Perizinan usaha yang diterbitkan		50,000,000	APBD		2 MoU	50,000,000
2		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan	125 KUMKM	300,000,000	APBD		125 KUMKM	300,000,000
3		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha	1 Keg	50,000,000	APBD		1 Keg	50,000,000
VI			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Prosentase Usaha mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	3%	1,700,000,000				1,600,000,000
1			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1,700,000,000	-	-	-	1,600,000,000
1		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	KOTA BANJAR	Jumlah Usaha mikro yang di beri stimulan	1600	1,700,000,000	APBD			1,600,000,000
				KOTA BANJAR	Jumlah pelaku UMK yang mendapat pembinaan produk unggulan (UMK)	20					
				KOTA BANJAR	Jumlah event Pameran (even)	2 event	100,000,000				100,000,000
				KOTA BANJAR	Jumlah Penerima Bantuan modal JPE	1500 org	1,600,000,000				1,600,000,000
				KOTA BANJAR	Tersedianya Bangunan Outlet pemasaran Produk UMKM	1 Unit	-	BANPROV			-
				KOTA BANJAR	Terfasilitasinya sarana dan prasarana tempat usaha para pedagang kaki lima	1 Paket	-	BANPROV			-
				KOTA BANJAR	Tersedianya sarana Kendaraan Promosi pemasaran Produk UMKM	1 Unit					
			PERDAGANGAN				276,056,828				276,643,240
I			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				78,834,125				78,834,125
1			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				48,500,000				48,500,000
1		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	KOTA BANJAR	Terfasilitasinya lahan tanah PT KAI yg digunakan oleh pasar Banjar		48,500,000	APBD	-	-	48,500,000
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di bangun	3 unit			-	-	-
					Revitalisasi /Pemeliharaan Pasar	3 Unit		APBD PROV	-	-	
2			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				30,334,125				30,334,125
1		3.30.03.2.02.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	KOTA BANJAR	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan		30,334,125	APBD			30,334,125
II			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				55,000,000				45,000,000

1			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-				-
1		3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	KOTA BANJAR			-				-
2			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				45,000,000				45,000,000
1		3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Tersedianya data IHK	12 kali	15,000,000	APBD		12 kali	15,000,000
2		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	KOTA BANJAR	Tersedianya data harga sembako dan barang strategis lainnya	96 Kali	15,000,000	APBD		96 Kali	15,000,000
3		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terpenuhinya distribusi barang/kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan	2 Kali	15,000,000	APBD		2 Kali	15,000,000
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di TK daerah Kabupten/Kota				10,000,000				10,000,000
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Petstisida bersubsidi	KATA BANJAR	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Petstisida bersubsidi	4 Kali	10,000,000				10,000,000
III			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentas Pertumbuhan nilai Ekspor	%	52,000,000				32,000,000
1			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pertumbuhan nilai Ekspor		52,000,000				32,000,000
1		3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen movev	Dokumen	7,000,000	APBD		1 dok.	7,000,000
					Jumlah Penerima Hibah	Kel	-	APBD		2 event	25,000,000
			Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional	Event	30,000,000	APBD		2 event	
			Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Lokal	Event	15,000,000				
IV			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	96.67	52,222,703			96.67	50,000,000
1			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86.67	52,222,703			90.00	50,000,000
1		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	KOTA BANJAR	Terlayannya tera/tera ulang alat UTTP	2600 UTTP	44,722,703	APBD		2700 UTTP	42,500,000
				KOTA BANJAR	Terfasilitasinya verifikasi alat standar ukur ke Kementrian Perdagangan	1 dok		APBD		53 jenis alat standar	
				KOTA BANJAR	Tersedianya Gedung metrologi	1 unit	-	APBN		0	-
2		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	KOTA BANJAR	Terlaksananya pengawasan penggunaan alat UTTP di Kota Banjar	5 Kali	7,500,000	APBD		5 Kali	7,500,000
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				38,000,000.00				60,809,115.00
			Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				38,000,000.00				60,809,115.00
			Pelaksanaan Promosi ,Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	5UMKM	23,000,000.00				45,809,115.00

			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	KOTA BANJAR	Jumlah data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4 Dok	15,000,000.00				15,000,000.00
					-		608,201,770.00			608,493,625.00	
			PERINDUSTRIAN				608,201,770			-	608,493,625
I			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	KOTA BANJAR	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		300,000,000				415,000,000
1			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		300,000,000				415,000,000
1		3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Hibah bagi Dekranasda	Dokumen	100,000,000.00	APBD		Dokumen	45,000,000.00
			Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Dokumen	100,000,000.00	APBD			70,000,000.00
2		3.31.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Kali(40 IKM)	-	APBD		1 Kali(40 IKM)	125,000,000
				KOTA BANJAR	Terdedinya mobil kemasan	1 unit	-	BANPROV		0	
3		3.31.02.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat(Pelatihan Desain Kemasan)	1Kali(25 IKM)	100,000,000	APBD		1Kali(25 IKM)	175,000,000
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				130,000,000				115,000,000
4		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	80,000,000.00	APBD		Dokumen	80,000,000.00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	50,000,000.00				35,000,000.00
II			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				178,201,770				78,493,625
1			Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya informasi Industri	1 dok	178,201,770				78,493,625
1		3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1 Dokumen	78,201,770	APBD		1 Dokumen	28,493,625
					Fasilitasi Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) Bagi IKM	1 Dokumen	100,000,000.00			1 Dokumen	50,000,000
			Jumlah Anggaran OPD				11,890,057,411				11,959,812,603
			Terdiri dari :								
			Belanja Gaji Pegawai				4,555,404,505				4,555,404,505
			Belanja Kegiatan				7,334,652,906				7,404,408,098

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai perencanaan kinerja dalam upaya mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Dan RPJMD Kota Banjar di tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan RPJMD Kota Banjar di tahun 2023.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan memudahkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap subkegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap sub kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintahan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan RPJMD Kota Banjar di tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar ini sebagai acuan kerja Perangkat daerah tahun 2024. Semoga Allah SWT selalu melindungi langkah kita . Aamiin ya robbal alamiin...

Banjar, 17 Juli 2024

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KOTA BANJAR



Hj. SRI SOBARIAH, S.E., M.E., M.M.
NIP. 19740423 199902 2 001

